

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

- Agus Santoso. 2013. *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Inonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Arikuntoro, Suharsimi. 1982. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Ghalian Indonesia.
- Dadang, Solihin. 2010. *Kamus Otonomi Daerah Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
- Hanafi Nurcholis. 2005. *Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Ibrahim, Johnny. 2011. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Jimly Asshiddiqie. 2013. *Perkembangan & Konsidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Garafika.
- Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yoyakarta: Andi.
- Roni Hanitjo Soemitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance*, Cetakan Kedua. Bandung: Mandar Maju.
- Silalahi. 2005. *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*. Jakarta: PT Sinar Agpe Press.
- Siswanto Sunarno. 2012. *Hukum Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemitro, Roni Hanitjo. 1982. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Solihin Dadang. 2001. *Kamus Otonomi daerah Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta.
- Suparmoko M. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah* Yogyakarta: Andi.
- Syaukani, HR. 2004. *Otonomi Daerah demi Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Nuansa Madani.
- Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Literatur Jurnal

- Aira Aras. 2011. *Jurnal Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- BPS Kota Surakarta. 2011. *Statistik Daerah Kota Surakarta*. Surakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, Buku 1. Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 1999-2002.
- Munaim. 2012. *Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Tesis Magister Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka UPBJJ.
- Permatasari, Lusi dan Lestariningsih. 2017. *Kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah*. JWP Vol 1, No.6.
- Mokodompit, Deissy dan Jenny Morasa. 2017. *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu*. Manado

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Milik Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.